
**PENGARUH PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DI DESA BLORO KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA**

Elisabet Luju, Imelda Virgula Wisang, Cicilia Ayu Wulandari, Emanuel Anjelo Poin

Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa Maumere

Latar belakang penelitian ini adalah belum maksimalnya pengelolaan Alokasi dana Desa dan kurang efektifnya program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bloro kecamatan Nita kabupaten Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Gambaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat; (2) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat; (3) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat; (4) Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat; (5) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bloro sebanyak 79 orang. Metode analisis yang digunakan adalah *path analysis*. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan Masyarakat dikategorikan cukup tinggi, Pemberdayaan Masyarakat dikategorikan cukup baik sedangkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikategorikan baik. Berdasarkan *path analysis*, Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya pengaruh langsung variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Variabel pemberdayaan masyarakat di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka belum sepenuhnya efektif dalam mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat. Pemerintahan Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka disarankan untuk lebih memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata Kunci: pengelolaan alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Dalam sistem pengelolaan, Kepala Desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola Dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan Desa, seperti Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan Desa bisa dilaksanakan serta dengan iringan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa harus mampu mengelola dana yang di mana telah di berikan tanggungjawab kepada perangkatnya, dan mengawasi akan pelaksanaan dari kegiatan atau program yang di laksanakan dengan menggunakan dana yaitu Alokasi Dana Desa. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Alokasi Dana desa sebagian memang diperuntukan untuk pembangunan. Pembangunan salah satu alat penunjang bagi suatu Desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi Dana Desa, sesuai rencana atau Musyawarah Perencanaan.

Pembangunan Desa harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Desa, agar supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa ada berbagai jenis salah satunya Pembangunan, dengan adanya Pembangunan Infrastruktur bisa membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan, alokasi dasar dan alokasi yaitu dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa Kabupaten/Kota.

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Kabupaten Sikka terdiri dari 21 kecamatan yang meliputi 147 desa dan 13 kelurahan, dan mempunyai luas wilayah 7.552,91 km² yang terdiri dari 1.731,91 km² luas daratan dan 5.821 km² luas lautan. Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Talibura dengan 12 Desa dan Kecamatan yang paling sedikit desanya adalah Mapitara dengan 4 Desa. Sebelum Tahun 2007, Kabupaten Sikka terdiri dari 12 Kecamatan. Seiring dengan diberlakukan UU Otonomi Daerah terjadi pemekaran wilayah Kecamatan menjadi 21 Kecamatan.

Kecamatan Nita merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sikka dengan luas wilayah 141,07 km². Saat ini Kecamatan Nita terdiri dari dua belas Desa dan Pusat pemerintahan berada di Nita Desa Nita. Desa Bloro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Nita. Jumlah penduduk di Desa Bloro tahun 2018 berjumlah 1.482 jiwa.

Dalam pembagian kewilayahan, Desa Bloro terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, yaitu: Dusun Koligahar, Dusun Wukak, Dusun Bloro, dan Dusun Siransina. Untuk mengukur sejauh mana tingkat pemberdayaan masyarakat Desa Bloro sebagai dampak dari pengalokasian Dana Desa, maka diperlukan indikator yang akan digunakan sebagai alat ukur. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan kuesioner yang akan dibagikan kepada masyarakat Desa Bloro. Indikator tersebut mencakup indikator Alokasi Dana Desa dan indikator pemberdayaan masyarakat. Indikator Alokasi Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 2 ayat 1, yaitu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, sedangkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan menggunakan indikator keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi (Soetomo, 2014:48).

Berikut ini adalah data pendapatan desa pada Desa Bloro tahun 2015-2018:

Tabel 1. Pendapatan Desa Bloro Tahun 2015-2018

Tahun Anggaran	Pendapatan			Total (Rp)	Persentase (%)
	Alokasi Dana Desa (Rp)	Dana Desa (Rp)	Bagi Hasil Pajak (Rp)		
2015	332.200.000	80.183.934	4.465.500	420.099.434	11,52
2016	351.200.000	600.842.112	8.485.500	960.527.612	26,35
2017	375.042.264	765.887.668	20.957.238	1.161.887.170	31,38
2018	386.623.000	702.818.000	11.836.734	1.101.477.734	30,22
Total (Rp)	1.446.065.264	2.149.731.714	45.744.972	3.643.991.950	100

Sumber Data: Data Desa Bloro

Dari tabel di atas terlihat pendapatan Desa Bloro dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 pendapatan Desa Bloro mengalami penurunan sebesar Rp 60.409.436,00.

Berikut data Alokasi Dana Desa pada Desa Bloro tahun 2015-2018:

Tabel 2. Data Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2018

Tahun Anggaran	Pembiayaan				Tak Terduga (Rp)	Total (Rp)
	Pembangunan Desa (Rp)	Pembinaan Kemasyarakatan (Rp)	Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Rp)	Pemberdayaan Masyarakat (Rp)		
2015	85.952.000	12.979.000	279.109.434	72.771.000	-	450.811.434
2016	370.633.350	34.866.062	374.920.000	243.123.200	-	1.023.542.612
2017	462.917.000	44.524.691	407.104.500	336.016.168	1.000.000	1.251.562.359
2018	524.522.000	56.410.000	368.424.358	199.320.334	2.400.000	1.151.076.692

Total	1.444.024.350	148.779.753	1.429.558.292	851.230.702	3.400.000	3.876.993.097
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------

Sumber : Data Desa Bloro

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Begitu pula dalam Permendagri No.37 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa seharusnya setiap desa menggunakan ADD untuk belanja aparatur operasional desa sebesar 30% serta untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari total penerimaan ADD dimasing-masing desa. Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh, Penggunaan ADD Desa Bloro belum fokus terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan pemberdayaan masyarakat hanya mencapai 21,96 % dari total ADD di mana penggunaan ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat seharusnya mencapai 70% dari total keseluruhan ADD yang diterima Desa Bloro Kecamatan Nita.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?; (2) Apakah ada pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?; (3) Apakah ada pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?; (4) Apakah ada pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?; (5) Apakah ada pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Gambaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka; (2) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka; (3) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka; (4) Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka; (5) Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

TINJAUAN PUSTAKA

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum. Dari dana alokasi umum tersebut kemudian Kabupaten memberikan kepada Desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan Desa dalam

rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa tersebut. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di dalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi Desa menuju kemandirian Desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan Desa menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut di samping merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju Desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap Desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam konteks penelitian ini, variabel Alokasi Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Alokasi Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu: a) penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; b) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat; c) Keterbukaan proses pengelolaan; d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Akuntabel, yaitu: a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa; b) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana; c) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa; d) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Partisipatif, yaitu: a) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa; b) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kesejahteraan

Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera,

yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012:8). Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb, sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb.), kemakmuran. Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1284).

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia moderen adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Basri, 2005: 24).

Adapun pengertian kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan keamanan dan keselamatan hidup. Kesejahteraan telah termasuk kemakmuran hidup, yaitu keadaan yang menunjukkan keadaan orang hidup aman dan tenteram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya (Fahrudin, 2012: 44).

Konsep sejahtera menurut BKKBN (1999:20), dirumuskan lebih luas daripada sekedar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan. Konsep sejahtera tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Ada tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu: kebutuhan dasar, sosial, dan kebutuhan pengembangan. Apabila hanya satu kebutuhan saja yang dapat dipenuhi oleh keluarga, misalnya kebutuhan dasar, maka keluarga tersebut belum dapat dikatakan sejahtera menurut konsep ini.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan gabungan yang terjadi antara (*intervening*) dalam proses pemberdayaan (*process of empowerment*). Kata pemberdayaan masyarakat seolah mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat diantara kehidupan dalam masyarakat, baik dalam menyikapi perubahan sosial, hubungan sosial, ataupun dalam mengembangkan kreatifitas yang ada di dalam kehidupannya.

Menurut Adisasmita (2013:78) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan,

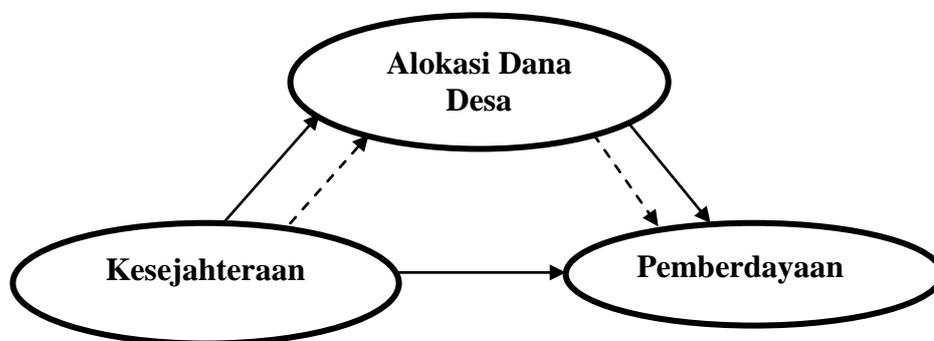
monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:25) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Elliot dalam Sumaryadi (2005:150) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain: (a) *the welfare approach* yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam dan pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, (b) *the development approach*, pendekatan ini memusatkan perhatian pada pembangunan peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat, (c) *the empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dalam penelitian. Berikut adalah bagan pengaruh langsung Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengaruh tidak langsung melalui pemberdayaan masyarakat:



Keterangan:

- > Pengaruh langsung
- - - - -> Pengaruh tidak langsung

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pengelolaan Dana Alokasi Desa berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
- H2 : Pengelolaan Dana Alokasi Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
- H3 : Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan

- H4 Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
Pengelolaan Dana Alokasi Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pegawai melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Asosiatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Bloro berjumlah 381 Kepala Keluarga. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan berdasarkan rumus Slovin, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 79 responden.

Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, maka variabel-variabel ini dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa diartikan sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014).
2. Pemberdayaan berarti upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di Desa Bloro Kecamatan Nita sehingga masyarakat dapat menentukan masa depan mereka untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan perekonomiannya.
3. Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya

Instrumen Penelitian

Berdasarkan definisi operasional, maka Indikator dan Sub Indikator Variabel Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator dan Ukuran Variabel Alokasi Dana Desa

Indikator	Ukuran	Skala
1. Transparan	Terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.	Likert
2. Akuntabel	Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD serta adanya pengawasan oleh tim pelaksana	Likert
3. Partisipatif	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD	Likert

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan definisi operasional, maka Indikator dan Sub Indikator Variabel Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator dan Sub Indikator Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Indikator	Sub Indikator	Skala
1. <i>Community Activation</i>	a. Kegiatan untuk mendorong partisipasi anggota masyarakat. b. Keterlibatan pemangku kepentingan. c. Motivasi pemimpin baru. d. Inisiasi dan stimulasi kelompok baru.	Likert
2. <i>Community Competence</i>	a. Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota masyarakat dalam memecahkan masalah komunitas. b. Distribusi informasi tentang praktik yang baik. c. Berbagi informasi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan teori.	Likert
3. <i>Management Skill</i>	d. Pelatihan manajemen dan keterampilan e. Pelatihan menggunakan informasi dan komunikasi	Likert
4. <i>Creation Supportif Environment</i>	a. Memberikan dukungan politik dan akses sumber daya b. Menciptakan lingkungan sosial yang mendukung	Likert

Sumber: Kasmel dan Anderson (2011)

Indikator dan ukuran Variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator dan Sub Indikator Variabel Kesejahteraan

Indikator	Ukuran	Skala
1. <i>Kebutuhan Dasar Keluarga” (Basic Needs)</i>	a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.	Likert
2. <i>Kebutuhan Psikologis” (Psychological Needs)</i>	a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur. b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m ² untuk setiap penghuni rumah. e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.	Likert
3. <i>Kebutuhan Pengembangan (Develomental Needs)</i>	a. Keluarga berupaya meningkatkan pengentahuan agama. b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung c. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal. d. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.	Likert
4. <i>Aktualisasi Diri” (Self Esteem)</i>	a. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan. b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan institusi.	Likert

Sumber: BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional)

Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen yaitu Uji Validitas, dan Uji rehabilitas. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat normalitas.

Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian. Menurut Narimawati (2007:45) untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Skor Aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Untuk mengkategorikan nilai skor total dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kriteria Presentase Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kategori Skor
1	20.00% – 36.00%	Tidak Baik
2	36.01% – 52.00%	Kurang Baik
3	52.01% – 68.00%	Cukup Baik
4	68.01% – 84.00%	Baik
5	84.01% – 100%	Sangat Baik

Berdasarkan kriteria persentase tanggapan responden, masalah dari penelitian ini dapat diukur dari keseluruhan persentase (100%) dikurangi dengan persentase tanggapan responden. Hasil dari pengurangan tersebut adalah persentase kesenjangan (gap) yang menjadi masalah yang akan diteliti.

Analisis Jalur

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (*path analysis*). Sani dan Maharani (2013:74) menyatakan bahwa analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menganalisis pola hubungan di antara variabel. Model ini untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Deskriptif Variabel Alokasi Dana Desa

Tanggapan responden terhadap variabel Alokasi Dana Desa dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 7. Deskripsi Variabel Alokasi Dana Desa

No	Pernyataan	Skor Aktual (%)	Kriteria
1	Terbukanya akses bagi Masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban ADD.	65.06	Cukup Baik
2	Tercapainya tujuan dalam pengelolaan ADD serta adanya pengawasan oleh tim pelaksana.	72.41	Baik
3	Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ADD.	74.18	Baik
4	Proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka.	73.67	Baik
5	Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.	68.35	Baik
% Skor Total & Katagori Variabel		70.73	Baik
Persentase Kesenjangan (Gap) yang Menjadi Masalah		29.27	

Dari hasil analisis deskriptif pada Tabel 7. diketahui bahwa persentase skor total untuk variabel Alokasi Dana Desa adalah 70.73%. Berdasarkan katagori nilai skor total dapat disimpulkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa termasuk dalam kategori baik.

Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Tanggapan responden terhadap variabel Pemberdayaan Masyarakat dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 8. Deskripsi Variabel Pemberdayaan Masyarakat

No	Pernyataan	Skor Aktual (%)	Kriteria
1	Aparat desa selalu mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat.	59.75	Cukup Baik
2	Selain aparat desa, instansi lain dan SLM sering terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat.	59.24	Cukup Baik
3	Aparat Desa pada tingkat RT/RW sering motivasi Masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat.	56.96	Cukup Baik
4	Aparat Desa selalu mendorong Masyarakat untuk mendirikan kelompok-kelompok pemberdayaan (misalnya kelompok tani dll).	59.24	Cukup Baik
5	Aparat Desa selalu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat dalam memecahkan masalah.	66.84	Cukup Baik
6	Setelah mengikuti pelatihan, antara sesama anggota Masyarakat dapat saling bertukar pikir misalnya tentang praktik pertanian.	66.84	Cukup Baik
7	Setelah mengikuti pelatihan, anggota kelompok dapat membagi informasi tentang konsep dan teori kepada Masyarakat di luar dari kelompoknya.	66.58	Cukup Baik
8	Setelah mengikuti pelatihan, anggota kelompok memiliki kemampuan manajemen dan peningkatan keterampilan.	67.85	Cukup Baik
9	Anggota kelompok selalu mengetahui perkembangan, misalnya harga atau informasi teknologi yang terbaru.	56.46	Cukup Baik
10	Kelompok tani selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah terutama kemudahan untuk akses modal.	58.23	Cukup Baik
11	Dalam setiap kesempatan aparat Desa selalu menghimbau Masyarakat umumnya untuk selalu mendukung kegiatan yang dilakukan kelompok – kelompok yang ada di Masyarakat .	66.33	Cukup Baik
% Skor Total & Katagori Variabel		62.21	Cukup Baik
Persentase Kesenjangan (Gap) yang Menjadi Masalah		37.79	

Dari hasil analisis deskriptif pada Tabel 8. diketahui bahwa persentase Skor total untuk variabel Pemberdayaan Masyarakat adalah 62.21%. Berdasarkan katagori nilai skor total dapat disimpulkan bahwa variabel Pemberdayaan Masyarakat termasuk dalam kategori Cukup Baik.

Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Tanggapan responden terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 9. Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat

No	Pernyataan	Skor Aktual (%)	Kriteria
1	Pada umumnya setiap anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.	42.03	Rendah
2	Setiap anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.	47.85	Rendah
3	Setiap Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.	51.14	Rendah
4	Setiap anggota keluarga yang sakit selalu dibawa ke sarana kesehatan.	53.67	Cukup Tinggi
5	Setiap pasangan usia subur selalu memperoleh pelayanan kontrasepsi.	51.39	Rendah
6	Setiap anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.	51.14	Rendah
7	Setiap anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur.	53.67	Cukup Tinggi
8	Paling kurang satu minggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.	53.42	Cukup Tinggi
9	Setiap anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.	56.71	Cukup Tinggi
10	Luas lantai rumah paling kurang 8 m ² untuk setiap penghuni rumah.	61.77	Cukup Tinggi
11	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing	63.80	Cukup Tinggi
12	Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.	57.47	Cukup Tinggi
13	Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.	58.99	Cukup Tinggi
14	Sebagian penghasilan keluarga ditabung	59.24	Cukup Tinggi
15	Keluarga sering ikut dalam kegiatan Masyarakat dilingkungan tempat tinggal	56.20	Cukup Tinggi
16	Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.	58.99	Cukup Tinggi
17	Anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan.	54.18	Cukup Tinggi
18	Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus lembaga misalnya pengurus kelompok.	51.14	Rendah
% Skor Total & Katagori Variabel		54.60	Cukup Tinggi
Persentase Kesenjangan (Gap) yang Menjadi Masalah		45.40	

Dari hasil analisis deskriptif pada Tabel 9. diketahui bahwa persentase skor total untuk variabel Kesejahteraan Masyarakat adalah 45.40%. Berdasarkan katagori nilai skor total dapat disimpulkan bahwa variabel Kesejahteraan Masyarakat termasuk dalam kategori cukup tinggi.

Analisis Jalur *Path Analysis*

Analisis data dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*), yaitu menguji pola hubungan yang mengungkap pengaruh variabel dengan atau seperangkat variabel

terhadap variabel lainnya, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah.

Langkah Pertama Path Analysis

Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang model (kerangka berpikir) berdasarkan konsep dan teori, secara teoritis. Berdasarkan konsep dan teori, selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian. Model dan hipotesis tersebut selanjutnya dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sehingga membentuk sistem persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1 X + e_1$$

$$Y_2 = a + b_1 X + b_2 X + e_2$$

Langkah Kedua Path Analysis

Langkah kedua didalam analisis jalur adalah pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path. Untuk pendugaan parameter dilakukan dengan analisis regresi melalui software SPSS 16.0 for windows. Hasil dari analisis menghasilkan dua persamaan sebagai berikut:

1. Persamaan pertama: pengaruh variabel Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 10. Analisis Regresi Pengaruh Pengaruh Variabel Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,885	3,417		7,575	0,000
	Alokasi Dana Desa	0,471	0,188	0,275	2,506	0,014

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1 X + e_1$$

$$Y_1 = 25,885 + 0,471X$$

e_1 merupakan varian variabel Pemberdayaan Masyarakat yang tidak dijelaskan oleh variable Alokasi Dana Desa. Besarnya $e_1 = \sqrt{1 - R^2}$
 R^2 (R Square) diperoleh dari Model Summary yang terlihat pada tabel 11. sebagai berikut:

Tabel 11. Model Summary Variabel Alokasi Dana Desa Terhadap Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,275 ^a	0,075	0,063	7,00748

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Tabel 11. Selanjutnya dilakukan perhitungan (e_1) sebagai berikut:

$$(e_1) = \sqrt{1 - R^2}$$

$$= \sqrt{1 - (0,075)}$$

$$= 0.962$$

2. Persamaan kedua: pengaruh variabel Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 12. Analisis Regresi Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,271	5,828		4,680	0,000
	Alokasi Dana Desa	0,639	0,252	0,276	2,530	0,013
	Pemberdayaan Masyarakat	0,309	0,147	0,229	2,100	0,039

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 12. dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_2 = \alpha + b_2 X + b_3 Y_1 + e_2$$

$$Y_2 = 27,271 + 0,639X + 0.309Y_1$$

e_2 merupakan varian variabel Kesejahteraan Masyarakat yang tidak dijelaskan oleh variable Alokasi Dana Desa dan variable Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya e_2

$$= \sqrt{1 - R^2}$$

R^2 (R Square) diperoleh dari Model Summary yang terlihat pada Tabel 13. sebagai berikut:

Tabel 13. Model Summary Variabel Alokasi Dana Desa dan Variabel Pemberdayaan Masyarakat terhadap Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.676 ^a	0.457	0.435	4.96414

a. Predictors: (Constant), Motivasi Pegawai, Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Tabel 13. selanjutnya dilakukan perhitungan (e_1) sebagai berikut:

$$(e_2) = \sqrt{1 - R^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0.163}$$

$$= 0.915$$

Berdasarkan *Summary* dan Koefisien jalur 1 dan 2 maka dapat diketahui besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel. Perhitungan pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung setiap jalur dapat dilihat pada *Standardized Coefficient (beta)* seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Standardized Coefficient (beta)

Model	Standardized Coefficient (beta)	Jalur (Path)
1. Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat	0.275	p ₁
2. Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat	0.276	p ₂
3. Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat	0.229	p ₃

2. Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh variabel Tambahan Penghasilan terhadap variabel Kinerja Pegawai melalui variabel Motivasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} X \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 &= (p_1 \times p_3) \\ &= (0,276 \times 0,229) \\ &= 0,063 \end{aligned}$$

Nilai 0.063 berarti bahwa pengaruh tidak langsung Tambahan Penghasilan terhadap variabel Kinerja Pegawai melalui variabel Motivasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka adalah sebesar 0.063.

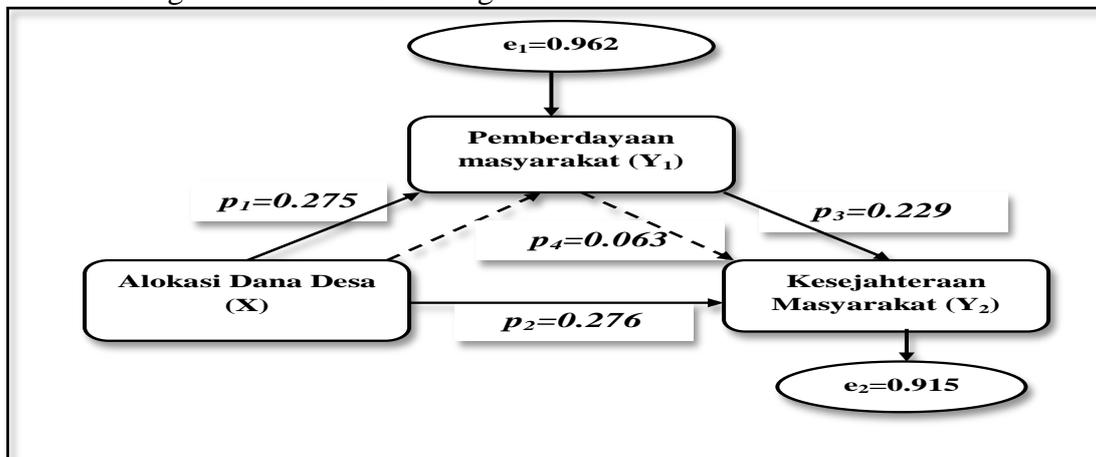
3. Pengaruh Total

Pengaruh total diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} Total\ Effect &= \text{pengaruh langsung} + \text{pengaruh tidak langsung} \\ &= p_2 + (p_1 \times p_3) \\ &= 0,443 + (0,276 \times 0,229) \\ &= 0,339 \end{aligned}$$

Pengaruh total Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka adalah sebesar 0,339.

Berdasarkan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total, dapat dilihat hubungan antara variabel sebagai berikut:



Gambar 2. Validasi Model Gambar Jalur Akhir

Berdasarkan Gambar 2. dapat dijelaskan bahwa variabel Pemberdayaan Masyarakat belum mampu berperan sebagai *variabel intervening* atau memediasi pengaruh variabel Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pengaruh langsung variabel Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0.276. Pengaruh langsung ini lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung variabel Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat yang hanya sebesar 0.063. Jadi hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat sebagai variabel *intervening* ditolak.

Langkah ketiga *Path Analysis*

Langkah ketiga dalam analisis jalur adalah melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian.

Pengaruh yang signifikan dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi dengan tingkat signifikansi uji hipotesis yang lebih kecil dari 0.05.

Tabel 15. Hasil Analisis Jalur

Hubungan	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
Alokasi Dana Desa (X) →Pemberdayaan Masyarakat (Y ₁)	2,505	0.014	Signifikan
Alokasi Dana Desa (X) → Kesejahteraan Masyarakat (Y ₂)	3,162	0.002	Signifikan
Pemberdayaan Masyarakat (Y ₁) → Kesejahteraan Masyarakat (Y ₂)	2,810	0.006	Signifikan

Berdasarkan Tabel 15. selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hipotesis yang diajukan.

1. Hipotesis pertama (H₁): Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
Hasil perhitungan pada Tabel 15. menunjukkan taraf signifikansi sebesar $0,014 < 0,05$ maka H₁ diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Berpengaruh signifikan dapat diartikan bahwa apabila Alokasi Dana Desa diberikan dengan lebih baik maka Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita akan meningkat secara signifikan.
2. Hipotesis kedua (H₂): Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
Hasil perhitungan pada Tabel 15. menunjukkan taraf signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ maka H₂ diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Berpengaruh signifikan dapat diartikan bahwa apabila Alokasi Dana Desa diberikan dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka akan meningkat secara signifikan.
3. Hipotesis Ketiga (H₃): Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.
Hasil perhitungan pada Tabel 15. menunjukkan taraf signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$ maka H₃ diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Berpengaruh signifikan dapat diartikan bahwa apabila Pemberdayaan Masyarakat ditingkatkan dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka akan meningkat secara signifikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa Variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikategorikan baik, Variabel Pemberdayaan Masyarakat dikategorikan Cukup Baik, sedangkan Variabel kesejahteraan masyarakat dikategorikan cukup tinggi.
2. Berdasarkan hasil analisis jalur, Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini terbukti dengan besarnya nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima, dengan demikian apabila Pengelolaan Alokasi Dana Desa diberikan dengan lebih baik maka Pemberdayaan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka akan meningkat secara signifikan.
3. Berdasarkan hasil analisis jalur, Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini terbukti dengan besarnya nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka H_2 diterima, dengan demikian apabila Pengelolaan Alokasi Dana Desa diberikan dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka akan meningkat secara signifikan.
4. Berdasarkan hasil analisis jalur, Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini terbukti dengan besarnya nilai signifikan 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima, dengan demikian apabila Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan lebih baik maka Kesejahteraan Masyarakat Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka akan meningkat secara signifikan.
5. Berdasarkan hasil analisis jalur, pengaruh langsung variable Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0.276. Pengaruh langsung ini lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat yang hanya sebesar 0.063. Dengan demikian hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini ditolak. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Variabel pemberdayaan masyarakat di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka belum sepenuhnya efektif dalam mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat..

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka beberapa saran atau rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka lebih mengefektifkan lagi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam jangka pendek beberapa item pemberdayaan masyarakat yang perlu segera dilakukan perbaikan adalah:
 - a. Memastikan bahwa masyarakat terutama yang menjadi anggota kelompok pemberdayaan selalu mengetahui perkembangan, misalnya harga atau informasi teknologi yang terbaru.
 - b. Secara aktif terus menghimbau aparat pada tingkat RT/RW untuk sering motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Memastikan bahwa setiap kelompok pemberdayaan selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah baik Desa maupun Kabupaten dalam kemudahan untuk memperoleh akses modal.

- d. Lebih melibatkan lagi instansi lain (dinas terkait), SLM dan lembaga pendidikan dalam program pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Lebih mendorong lagi masyarakat untuk mendirikan kelompok-kelompok pemberdayaan dan tetap aktif dalam kelompok pemberdayaan tersebut.
 - f. Secara terus menerus meminta semua aparat Desa selalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintahan Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka diharapkan untuk memperbaiki pengelolaan Alokasi dana desa terutama berkaitan dengan:
 - a. Terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban ADD.
 - b. Penyediaan laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
 3. Kepada peneliti lain, jika ingin melakukan penelitian serupa, disarankan untuk melibatkan variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang belum diikuti sertakan dalam penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Pemerintahan Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basri, Ikhwan Abidin. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- BKKBN. 1999. *Materi Dasar Pelaksanaan Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: Kantor Manteri Negara Kependudukan BKKBN.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Narimawati, Umi . 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Sugono, Dendi, Sugiyono, dan Yeyen Maryani (Eds). 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sani, Ahmad dan Vivin Maharani. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. Malang: UIN Press.
- Soetomo. 2014. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Peraturan Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

